

MODEL PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN BAGI MASYARAKAT PENGANGGURAN PERKOTAAN SEBAGAI UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN DI LINGKUNGAN PEMUKIMAN PENDUDUK ASLI KOTA YOGYAKARTA

ABSTRAK

Masalah pokok yang dihadapi oleh penduduk asli di lingkungan pemukiman termarginalkan di kota Yogyakarta adalah rendahnya pendapatan, dan hal tersebut berakibat pada keadaan ketidakberdayaan serta dalam kondisi kekurangan dan kemiskinan. Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui jumlah penurunan pengangguran penduduk asli miskin di lokasi sample perkotaan melalui strategi pendidikan kewirausahaan dan pengaruhnya terhadap jumlah pendapatan yang diterima penduduk miskin, serta untuk mengetahui apakah strategi pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan kewirausahaan berpengaruh secara signifikan terhadap penurunan jumlah penduduk asli miskin di Kota Yogyakarta.

Penelitian ini menggunakan metode *Research and Development* yang terdiri dari empat tahapan: (1) studi pendahuluan pengembangan pelatihan kewirausahaan bagi pengangguran perkotaan di lokasi pemukiman penduduk asli Kota Yogyakarta sebagai upaya pengentasan kemiskinan, (2) penyusunan model pendidikan kewirausahaan bagi pengangguran perkotaan, (3) praktik usaha produktif, dan (4) monitoring dan pembinaan berkelanjutan dalam implementasi model pengembangan kewirausahaan bagi pengangguran perkotaan di Kota Yogyakarta sebagai upaya pengentasan kemiskinan. Jumlah peserta program yang dijadikan sample sebanyak 30 orang terdiri dari 2 kelompok yang berada di kecamatan Tegalrejo dan kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta. aPopulasi dalam penelitian ini yaitu seluruh pengangguran di Kota Yogyakarta. dengan menggunakan tehnik purposive sampling dan dengan melihat tingkat pendidikan dan diutamakan penduduk asli dalam kategori miskin. Tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi. Hasil pengujian ini kemudian disimpulkan untuk membuktikan keefektifan dari model pengembangan pendidikan/pelatihan kewirausahaan bagi pengangguran perkotaan di Kota Yogyakarta sebagai upaya pengentasan kemiskinan.

Kata Kunci: Kewirausahaan, pengangguran perkotaan, kemiskinan, penduduk asli.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Masalah pokok yang dihadapi oleh penduduk asli di lingkungan pemukiman termarginalkan di kota Yogyakarta adalah rendahnya pendapatan, dan hal tersebut berakibat pada keadaan ketidakberdayaan serta dalam kondisi kekurangan dan kemiskinan. Banyak faktor yang menyebabkan rendahnya pendapatan dan kemiskinan

bagi penduduk miskin dilingkungan pemukiman termarginalkan di kota Yogyakarta tersebut, antara lain dapat diidentifikasi sebagai berikut: (1) ketidakberdayaan dalam menghadapi persaingan memperoleh kesempatan kerja yang layak, (2) tingkat pendidikan yang relative rendah, (3) sikap narimo ing pandum, atau menerima apa adanya, (4) kurangnya memiliki jiwa kewirausahaan, (5) keterbatasan modal kerja untuk memulai usaha, (6) keterbatasan kepemilikan luasan lahan pekarangan dan lahan usaha lainnya, (7) ketidakberdayaan untuk mengembangkan usaha secara mandiri, dan (8) kurang memiliki ketrampilan atau skill untuk kegiatan usaha jasa, dagang maupun industri rumah tangga.

Masalah lainnya yang muncul di lingkungan pemukiman penduduk asli kota Yogyakarta adalah adanya kecenderungan jumlah pengangguran usia produktif yang semakin bertambah. Berdasarkan data statistik (BPS, 2007) jumlah pengangguran di Kota Yogyakarta pada tahun 2007 tercatat sebanyak 34.751 orang, yang tersebar di 14 kecamatan. Memasuki tahun 2006, pengangguran di DIY sekitar 582 ribu orang atau 34,21% dari jumlah penduduk, yang terdiri dari pengangguran terbuka sekitar 90 ribu orang, dan setengah penganggur kurang lebih 492 ribu orang. Sementara itu, penganggur yang mendaftarkan diri sebagai pencari kerja kurang lebih hanya 59 ribu orang, dengan berbagai latar belakang pendidikan. "Pendidikan SUP sekitar 7,5%, SLTA 64,3%, Diploma 6,2%, dan Sarjana 22% (www.depnakertrans.co.id). Kondisi semacam ini bila dibiarkan berlarut-larut akan menjadi titik rawan bagi munculnya ekses negatif, yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu semua pihak harus serius dalam upaya mengatasi permasalahan pengangguran ini.

Data pengangguran yang tercatat di provinsi Yogyakarta adalah data pengangguran terbuka tidak termasuk pengangguran terselubung atau setengah pengangguran seperti ibu

rumah tangga, mahasiswa yang masih belajar, dan para penerima dana pensiunan. Pengangguran terbuka adalah angkatan kerja yang masuk dunia kerja namun tidak memperoleh pekerjaan atau masih mencari pekerjaan (BPS, 2007: 6). Di provinsi Yogyakarta mengalami hambatan-hambatan khususnya dalam penyediaan lapangan pekerjaan. Bila dilihat dari banyaknya pencari kerja baik itu berasal dari propinsi Yogyakarta itu sendiri maupun pendatang dari daerah lain belum sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang sudah ada. Hal ini dapat ditunjukkan dengan tingkat partisipasi komposisi dari penyebaran angkatan kerja dan persaingan untuk memperoleh pekerjaan semakin ketat, sehingga hanya berpotensi dan yang mempunyai nilai tambahlah yang dapat dengan mudah mendapatkan pekerjaan. Di provinsi Yogyakarta penambahan jumlah tenaga kerja dan pertumbuhan jumlah penduduk sangatlah tinggi, sedangkan kemampuan untuk menciptakan kesempatan kerja sangat terbatas. Tingkat pengangguran terbuka di provinsi Yogyakarta ini, untuk daerah perkotaan lebih tinggi dari pada di daerah pedesaan. Hal ini ditunjukkan di daerah perkotaan penganggurannya relatif lebih besar karena penawaran tenaga kerja yang tinggi pula. Penyebab lain adalah oleh banyaknya angkatan kerja dari desa yang mencari pekerjaan ke kota. Pada umumnya para pencari kerja memilih sektor formal dan itu membutuhkan waktu relatif lama untuk menunggu sedangkan daya tampung pekerjaan di kota itu sendiri sangat terbatas. Di daerah pedesaan laju pengangguran terbuka lebih rendah, karena penawaran tenaganya relatif lebih kecil (BPS,2007:288). Berikut ini gambaran jumlah pengangguran di Kota Yogyakarta berdasarkan tingkat pendidikan dan persebaran di masing-masing kecamatan.

Tabel 1. Tingkat Pengangguran Kota Yogyakarta Menurut Tingkat Pendidikan Pada Tahun 2007

No	Nama Kecamatan	Tidak Tamat SD	SD	SMP	SMA	Akademi dan D3	PT	Jumlah Total
1	Tegalrejo	200	367	593	767	356	121	2.404.

2	Jetis	489	603	568	842	243	154	2.899
3	Gedong Tengen	120	302	303	633	89	169	1.616
4	Ngampilan	117	169	224	350	213	177	1.250
5	Pakualaman	124	183	236	364	200	265	1.352
6	Danurejan	101	334	416	697	180	121	1.849
7	Gondokusuman	313	903	1629	1979	114	751	6.359
8	Wirobrajan	148	193	204	298	147	174	1.164
9	Mantrijeron	891	1550	1275	1160	554	697	6.127
10	Kraton	138	211	329	429	66	46	1.282
11	Gondomanan	38	48	52	91	31	36	294
12	Mergangsan	284	422	538	1170	343	430	3.187
13	Umbulharjo	550	542	624	1244	403	416	3.779
14	Kotagede	136	151	209	276	121	64	957
	JUMLAH	3649	5978	6840	10363	4060	3601	34.751

Sumber : Badan Pusat Statistik. 2007.

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa jumlah pengangguran di Kota Yogyakarta masih menunjukkan angka yang cukup tinggi. Dari jumlah ini kita dapat melihat bahwa jumlah pengangguran yang ada selalu meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Meningkatnya jumlah pengangguran di Kota Yogyakarta antara lain disebabkan oleh banyaknya jumlah penduduk migran yang masuk untuk mencari pekerjaan maupun banyaknya penduduk baru yang selesai menyelesaikan studinya dan mencoba ikut bersaing untuk mendapatkan pekerjaan. Dengan semakin banyaknya penduduk pendatang dari luar daerah dengan memiliki ketrampilan dan skill memadai sesuai kebutuhan dunia usaha berakibat pada semakin ketatnya tingkat persaingan untuk berkompetisi dalam mendapatkan peluang dan kesempatan kerja penduduk kota Yogyakarta, dan kondisi ini secara tidak langsung berdampak pada semakin ketidakberdayaan masyarakat penduduk asli (lokal) kota Yogyakarta untuk mendapatkan kesempatan kerja dengan penghasilan yang layak. Jika hal tersebut tidak mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah setempat, maka keberadaan penduduk asli kota Yogyakarta yang bertempat tinggal di lingkungan pemukiman penduduk lokal yang termarginalkan dengan kehidupan yang serba kekurangan dan miskin akan terpinggirkan

secara alamiah untuk pindah dari perkotaan menuju ke desa-desa pinggiran dan bahkan akan tercabut dari lingkungan pemukiman budaya leluhurnya. Untuk dapat mengantisipasi agar pemukiman penduduk asli kota Yogyakarta tersebut dapat dilesatarikan dalam jangka panjang, maka perlu dilakukan upaya-upaya yang bersifat strategis antara lain melalui pembinaan kewirausahaan bagi penduduk asli kota Yogyakarta agar mereka memiliki pekerjaan dan kegiatan usaha yang dapat mendatangkan penghasilan yang layak secara berkelanjutan serta terbebas dari kemiskinan. Untuk selanjutnya maka dipandang perlu dilakukan kajian penelitian yang berjudul: Model Pendidikan Kewirausahaan Bagi Masyarakat Pengangguran Perkotaan sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Lingkungan Pemukiman Penduduk Asli Kota Yogyakarta.

Penelitian ini difokuskan kepada penanganan penduduk pengangguran miskin di lingkungan pemukiman penduduk asli Kota Yogyakarta didasarkan atas beberapa pertimbangan sebagai berikut, yaitu: (1) memberikan kesempatan bagi penduduk asli miskin yang menganggur untuk memiliki ketrampilan melalui pendidikan kewirausahaan, (2) pemukiman penduduk asli di Kota Yogyakarta agar tetap eksis dan berkelanjutan, (3) penduduk asli miskin di kota Yogyakarta agar memiliki pekerjaan dan penghasilan yang layak serta tetap mempertahankan nilai-nilai sosial budaya setempat, dan (4) umumnya mereka memahami tentang karakteristik produk lokal daerah yang memiliki nilai daya saing memadai untuk dikembangkan di lingkungannya.

Berbagai program pemberdayaan masyarakat perkotaan untuk pengentasan kemiskinan telah banyak dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Departemen Sosial melalui program JPS dan berbagai program lainnya, serta oleh pihak LSM-LSM, namun hasilnya

masih menunjukkan belum optimal dengan ditunjukkannya jumlah pengangguran dan tingkat kemiskinan penduduk kota yang masih cukup tinggi.

Menurut Hamanongan Ritonga Kepala Subdit pada Direktorat Analisis Statistik BPS (www.kompas.com) menyebutkan bahwa pada dasarnya ada dua faktor penting yang dapat menyebabkan kegagalan penanggulangan kemiskinan di Indonesia. *Pertama*, program-program penanggulangan kemiskinan selama ini cenderung berfokus pada upaya penyaluran bantuan social untuk orang miskin. Hal itu antara lain, berupa beras untuk rakyat miskin dan program jarring pengaman social (JPS) untuk orang miskin. Upaya ini akan sulit menyelesaikan persoalan kemiskinan yang ada karena sifat bantuan tidaklah untuk pemberdayaan, bahkan dapat menimbulkan ketergantungan. Program-program bantuan yang berorientasi pada kedermawanan pemerintah ini justru dapat memperburuk moral dan perilaku masyarakat miskin. Program bantuan untuk orang miskin seharusnya lebih difokuskan untuk menumbuhkan budaya ekonomi produktif dan mampu membebaskan ketergantungan penduduk yang bersifat permanent. Di lain pihak, program-program bantuan social ini juga dapat menimbulkan korupsi dalam penyalurannya. Faktor *kedua*, yang dapat mengakibatkan gagalnya program penanggulangan kemiskinan adalah kurangnya pemahaman berbagai pihak terhadap penyebab kemiskinan itu sendiri sehingga program-program pembangunan yang ada tidak didasarkan pada isu-isu kemiskinan, yang penyebabnya berbeda-beda secara local. Sebagaimana diketahui, data dan informasi yang digunakan untuk program-program penanggulangan kemiskinan selama ini adalah data makro hasil Survei Sosial dan Ekonomi Nasional (Susenas) oleh BPS dan data mikro hasil pendaftaran keluarga prasejahtera dan sejahtera I oleh BKKBN. Kedua data ini pada dasarnya ditujukan untuk

kepentingan perencanaan nasional yang sentralistik, dengan asumsi yang menekankan pada keseragaman dan focus pada indicator dampak. Pada kenyataannya, data dan informasi seperti ini tidak akan dapat mencerminkan tingkat keragaman dan kompleksitas yang ada di Indonesia sebagai Negara besar yang mencakup banyak wilayah yang sangat berbeda, baik dari segi ekologi, organisasi social, sifat budaya, maupun bentuk ekonomi yang berlaku secara lokal.

Dalam hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan Sujiono (2004) dengan judul "Pengaruh Tingkat Inflasi terhadap Tingkat Pengangguran Di Indonesia Tahun 1985-2002" dengan variabel Yaitu (tingkat pengangguran tahun t di Indonesia), X_t (tingkat inflasi tahun t di Indonesia), X_{t-1} (tingkat inflasi tahun $t-1$ di Indonesia), X_{t-2} (tingkat inflasi tahun $t-2$ di Indonesia), Yaitu-1 (tingkat pengangguran tahun $t-1$ di Indonesia), Y_{t-2} (tingkat pengangguran tahun $t-2$ di Indonesia), hasilnya mengenai teori kurva Phillips yang mengatakan bahwa pengaruh tingkat inflasi terhadap tingkat pengangguran bersifat negatif. Berdasarkan data yang diperoleh dan hasil estimasinya menyatakan bahwa selama tahun 1985-2002 di Indonesia tidak terbukti. Kemudian tingkat pengangguran tahun $t-1$ berpengaruh positif terhadap tingkat pengangguran tahun t di Indonesia dengan koefisien sebesar 0,799, yang artinya jika tingkat inflasi tahun t naik 1%, maka tingkat pengangguran tahun t naik sebesar 0,799%. Untuk nilai konstanta dari hasil estimasi tingkat pengangguran di Indonesia bertanda positif sebesar 1,192 yang menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di Indonesia selama tahun 1985-2002 sebesar 1,192% tanpa adanya pengaruh dari variabel tingkat inflasi tahun t , tingkat inflasi $t-1$, tingkat inflasi $t-2$, tingkat pengangguran $t-1$ dan tingkat pengangguran $t-2$ hasil nilai R^2 Adjusted yang diteliti Sujiono adalah 0,439, yang berarti sebesar 43,9% variasi perubahan tingkat

pengangguran tahun t di Indonesia dapat dijelaskan oleh setiap variasi perubahan tingkat pengangguran pada tahun $t-1$ dalam penelitian yang dilakukan oleh Sujiono (2004) hanya mengetahui Pengaruh Tingkat Inflasi terhadap Tingkat Pengangguran Di Indonesia Tahun belum menemukan cara bagaimana mengatasi pengangguran. Penelitian yang dilakukan oleh Kusmiyati (2008) “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengangguran terbuka di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1986-2005 juga belum mengatasi secara nyata untuk mengurangi angka pengangguran karena hanya mencari faktor-faktor penyebab pengangguran terbuka.

Oleh karena itu berdasarkan uraian diatas dan penelitian yang dilakukan oleh Sujiono (2004) dan Kusmiyati (2008) keduanya belum menemukan cara bagaimana mengatasi pengangguran setidaknya menekan angka pengangguran sehingga dapat menekan kemiskinan maka peneliti ingin melakukan suatu cara atau model untuk mengatasi pengangguran dan menekan angka kemiskinan dengan model pengembangan pendidikan kewirausahaan bagi pengangguran perkotaan di Kota Yogyakarta sebagai upaya pengentasan kemiskinan di lokasi pemukiman penduduk asli.

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian meliputi sebagai berikut:

- a. Lokasi Penelitian berada di dua kecamatan yaitu Kecamatan Tegalrejo dan kecamatan Umbulharjo wilayah Kota Yogyakarta, dengan mengambil dua sample desa yang tergolong desa pemukiman penduduk asli.
- b. Pendataan jumlah penduduk asli pengangguran miskin dan penghitungan tingkat rata-rata pendapatan, serta kepemilikan rumah dan lahan pekarangan.

- c. Penetapan penduduk pengangguran miskin yang diikutsertakan sebagai peserta program
- d. Pendataan sumber pendapatan penduduk miskin yang menjadi peserta program.
- e. Identifikasi tentang jenis usaha peserta program.
- f. Identifikasi berbagai program pemberdayaan penanggulangan kemiskinan yang pernah dilakukan sebelumnya dan seberapa jauh peserta program telah terlibat.
- g. Penyusunan modul pelatihan berwirausaha
- h. Identifikasi kegiatan program usaha yang akan dikembangkan bagi peserta program sesuai kemampuan peserta.
- i. Identifikasi kebutuhan peralatan dan permodalan yang memadai bagi peserta program.
- j. Pelatihan dan pembinaan berkelanjutan bagi peserta program
- k. Pembinaan manajemen pengelolaan hasil usaha dan pemasaran.
- l. Evaluasi kegiatan program, untuk mendapatkan informasi tentang keefektifan program pemberdayaan dalam kaitannya dengan peningkatan pendapatan dan penurunan jumlah penduduk miskin.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi permasalahan yang telah diuraikan di muka, perumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Apakah dengan program kegiatan pendidikan kewirausahaan bagi penduduk pengangguran miskin perkotaan mampu meningkatkan jumlah pendapatan yang diterima petani penduduk miskin?

2. Apakah dengan strategi pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan kewirausahaan berpengaruh secara signifikan terhadap penurunan jumlah penduduk asli miskin di Kota Yogyakarta?
3. Faktor-faktor apakah yang ikut berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan program penanggulangan kemiskinan di Kota Yogyakarta?

4. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui jumlah penurunan pengangguran penduduk asli miskin di lokasi sample perkotaan melalui strategi pendidikan kewirausahaan dan pengaruhnya terhadap jumlah pendapatan yang diterima penduduk miskin, serta untuk mengetahui apakah strategi pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan kewirausahaan berpengaruh secara signifikan terhadap penurunan jumlah penduduk asli miskin di Kota Yogyakarta. Adapun tujuan secara khusus adalah melakukan strategi pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan kewirausahaan kepada warga masyarakat miskin agar memiliki beberapa hal sebagai berikut yaitu: (a) memiliki ketrampilan dan jiwa kewirausahaan sehingga mampu mengembangkan diri dan berkarya untuk dapat mendatangkan tambahan penghasilan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan terbebas dari kemiskinan, (b) memiliki motivasi dan etos kerja yang tinggi dalam menjalankan kegiatan kewirausahaan, dan (c) memiliki pengetahuan dan ketrampilan serta sikap kemandirian dalam berwusaha sesuai dengan kebutuhan pasar.

4. Luaran Penelitian

Secara khusus luaran dari penelitian ini adalah berupa: (a) model pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan kewirausahaan, dan (b) buku ajar.

5. Manfaat Penelitian

Secara umum manfaat penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran berupa kebijakan strategi nasional tentang pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan kewirausahaan sebagai upaya penanggulangan kemiskinan di lingkungan pemukiman penduduk asli perkotaan. Sedangkan secara khusus dengan penelitian ini memiliki beberapa manfaat, yaitu antara lain: (1) meningkatkan kesempatan kerja bagi penduduk asli miskin di perkotaan, (2) mencegah terpinggirkannya pemukiman penduduk asli perkotaan yang berlebihan dan tidak bermanfaat, (3) meningkatkan pendapatan penduduk asli miskin di perkotaan yang sekaligus berdampak pada peningkatan PAD, (4) memperkuat pelaksanaan otonomi daerah melalui peningkatan mutu/kualitas sumberdaya manusia, dan (5) terwujudnya keadilan pendidikan bagi masyarakat miskin dan kurang mampu di perkotaan.

B. Kajian Pustaka dan Penelitian Sebelumnya.

1. Pengangguran dan Kemiskinan di Perkotaan, serta Permasalahannya.

Pengangguran terbuka atau pengangguran penuh (*Open Unemployment*) adalah penduduk yang tidak bekerja atau sedang mencari kerja pada tempat dengan tingkat upah tertentu atau seseorang yang telah memasuki usia kerja selama kurun waktu tertentu tidak bekerja dan bersedia menerima untuk menerima pekerjaan yang tersedia (Simanjuntak, 1998). Menurut Statistik Ketenagakerjaan (*Labor Force Statistics*) (1996:05) mencari pekerjaan atau yang biasa disebut pengangguran terbuka adalah mereka yang tidak bekerja dan mencari pekerjaan seperti mereka yang belum pernah bekerja dan sedang berusaha mendapat pekerjaan, atau yang sudah

pernah bekerja karena sesuatu berhenti atau diberhentikan dan sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi dalam kategori ini juga termasuk mereka yang telah memasukkan lamaran dan sedang menunggu hasilnya.

Menurut sebab terjadinya, pengangguran dapat digolongkan menjadi tiga jenis yaitu: pengangguran struktural, pengangguran friksional, dan pengangguran musiman (Simanjuntak, 1998). *Pertama*, pengangguran struktural yaitu pengangguran yang terjadi akibat adanya perubahan struktur perekonomian. Perubahan struktur yang demikian memerlukan perubahan dalam ketrampilan tenaga kerja yang dibutuhkan sedangkan pencari kerja tidak mampu menyesuaikan diri dengan ketrampilan baru tersebut. Sebagai contohnya pergeseran atau perubahan dari pertanian (*agraris*) menjadi industri. Perubahan disini dari sektor pertanian menjadi industri akan berakibat tenaga kerja disektor pertanian menganggur, karena tidak punya keahlian dibidang industri sedangkan karyawan industri tetap dapat bekerja. Pengangguran sebagai akibat perubahan struktur perekonomian pada dasarnya diperlukan tambahan latihan ketrampilan tertentu sesuai keahlian yang mereka miliki. Lamanya pengangguran struktural pada umumnya lebih panjang dari lamanya pengangguran friksional. Bentuk pengangguran struktural yang lain adalah terjadi pengangguran pekerja akibat penggunaan peralatan dan teknologi maju. Penggunaan traktor misalnya dapat menimbulkan pengangguran dikalangan petani. *Kedua*, pengangguran friksional yaitu pengangguran yang terjadi karena kesulitan temporer dalam mempertemukan pencari kerja dengan lapangan pekerjaan yang ada. Kesulitan temporer ini dapat berbentuk sekedar waktu yang diperlukan selama prosedur pelamaran dan seleksi atau terjadi karena faktor jarak atau kurangnya informasi. Pengangguran itu sulit dihindari walaupun secara teoritis jangka waktu pengangguran dipersingkat dengan penyediaan informasi pasar kerja yang lengkap melalui

bursa tenaga kerja dan Departemen Tenaga Kerja.. *Ketiga*, pengangguran musiman yaitu pengangguran terjadi pada waktu-waktu tertentu didalam satu tahun karena pergantian musim. Sebagai contoh diluar musim panen, banyak orang yang tidak mempunyai kegiatan ekonomis. Mereka hanya menunggu datangnya musim yang barn. Selama menunggu tersebut, mereka digolongkan sebagai pengangguran, tetapi hanya untuk sementara saja dan berlaku pada waktu-waktu tertentu. Oleh karena itu mereka dinamakan pengangguran musiman. Beberapa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yang bertujuan untuk menurunkan tingkat pengangguran yang semakin tinggi pada masa kini, diantaranya sebagai berikut: (a) proyek padat karya yang dirancang untuk memperkerjakan para pengangguran selama setahun atau sekitar setahun, dan sesudahnya pekerjaan dapat pindah ke sektor swasta. Jenis proyek ini menghindari salah sate kelemahan proyek dari proyek investasi pemerintah karena dapat dimulai dan diselesaikan dengan cepat, (b) perbaikan pelayanan pasar tenaga kerja, melalui informasi yang lebih baik seperti daftar kerja terkomputerisasi maka jumlah pengangguran dapat dikurangi, dan (c) program latihan yang dirancang untuk memudahkan transisi para pekerja-pekerja dari industri lama ke industri yang sedang marak. Hingga tingkat tertentu, program ini terbukti mampu menurunkan tingkat pengangguran. Sebagai contoh dalam bentuk pelatihan bahasa asing atau farming atau bidang tertentu untuk menunjang pekerjaan yang diperoleh sehingga akan lebih sesuai dengan keahlian dan bidang yang mereka miliki.

Pengangguran bagi masyarakat perkotaan membawa dampak yang sangat kompleks bagi kehidupan masyarakat, baik yang berkaitan dengan kondisi social-budaya, ekonomi, keamanan, idiologi dan politik. Ditinjau dari aspek ekonomi dampak pengangguran masyarakat perkotaan yang berkepanjangan akan membawa dampak pada

tidak terpenuhinya kebutuhan hidup pokoknya dan kemiskinan. Kemiskinan pada hakekatnya merupakan suatu keadaan ketidakberdayaan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dan serba keterbatasan dalam pemenuhan ha-hak politiknya. Kemiskinan sebagai sebuah fenomena sosial disebabkan oleh banyak faktor. Menurut Darwin (2005), terdapat empat faktor penyebab kemiskinan, *pertama*, faktor budaya, dimana penjelasan mengapa miskin tidak dicari dari luar, melainkan dari dalam diri orang atau masyarakat miskin sendiri sebagai pihak yang tertuduh sebagai penyebabnya. Budaya hidup miskin dianggap sebagai produk sosial kolektif, yang pada akhirnya dipandang sebagai kekuatan eksternal yang kondusif di mana individu larut atau tidak berdaya di dalamnya, karena memang tidak memiliki kekuatan untuk melawannya. *Kedua*, faktor struktural, di mana orang atau kelompok masyarakat miskin lebih disebabkan oleh berbagai kebijakan negara yang bukan saja tidak menguntungkan melainkan juga menjadikan mereka dimiskinkan. Kemiskinan struktural juga dapat merupakan produk dari sistem sosial, ekonomi, dan politik yang hegemonis dan eksploitatif. Sistem ekonomi pasar yang tidak terkendali bisa memarginalkan kelompok miskin, karena penguasaan aset-aset ekonomi oleh segelintir elit ekonomi. *Ketiga*, faktor alam, setidaknya ada tiga jenis yang tergolong sebagai penyebab yang alamiah ini, yaitu: pertama, kondisi alam yang kering, tandus dan tidak memiliki sumber alam yang dapat dimanfaatkan secara ekonomi, serta keterisolasian wilayah pemukiman penduduk; kedua, bencana seperti tanah longsor, gempa bumi, dan wabah penyakit baik menyerang manusia maupun sumber mata pencaharian penduduk (seperti menyerang hewan ternak dan tanaman penduduk); dan ketiga, kondisi fisik manusia baik berupa bawaan sejak lahir maupun pengaruh degenerasi yang menjadikan seseorang tidak memiliki kemampuan

untuk bekerja secara layak. *Keempat*, konflik sosial politik atau perang. Instabilitas sosial dan politik berpengaruh secara signifikan terhadap menurunnya produktifitas masyarakat, larinya modal dan akhirnya menyebabkan peningkatan pengangguran. Konflik vertikal dan horizontal berdampak pada terjadinya mobilitas paksa, perubahan tempat tinggal secara paksa, termasuk kehilangan lapangan kerja, harta benda, tanah, rumah atau tempat tinggal.

2. Pendidikan Kewirausahaan Sebagai Usaha Pengentasan Kemiskinan

Menurut Ronstand (1984) dalam Aliyah Rasyid (2008) kewirausahaan atau kewiraswastaan adalah merupakan suatu proses dinamis untuk menciptakan kesejahteraan tambahan. Kesejahteraan ini diciptakan oleh individu yang mengasumsikan sebuah risiko besar dalam sebuah keseimbangan, waktu dan/atau komitmen kerja untuk menghasilkan produk atau jasa yang bernilai. Produk atau jasa itu sendiri tidak harus selalu baru atau unik, tetapi wiraswastawan, dengan mengerahkan dan mengalokasikan sumber-sumber dan ketrampilan yang dibutuhkan untuk dapat menciptakan produk dan penghasilan.

Beberapa ahli mendefinisikan kewiraswastaan dari proses ekonomis yang dilakukan oleh wiraswastawan. Dari definisi semacam itu dapat disarikan sifat-sifat khas yang terdapat pada wiraswastawan. Wiraswastawan adalah suatu proses dinamis untuk menciptakan kesejahteraan tambahan. Kesejahteraan ini diciptakan oleh individu yang mengasumsikan sebuah resiko besar dalam sebuah kesimbangan, waktu dan/atau komitmen kerja untuk menghasilkan produk atau jasa yang bernilai. Produk atau jasa itu sendiri tidak harus selalu baru atau unik, tetapi wiraswastawan, dengan mengerahkan dan mengalokasikan

sumber-sumber dan keterampilan yang dibutuhkan (Ronstand, 1984). Wiraswastawan adalah usaha untuk menciptakan nilai dengan mengenali peluang bisnis, pengelolaan atas pengambilan resiko peluang, dan melalui komunikasi serta keterampilan melakukan mobilisasi manusia, agar rencana dapat terlaksana dengan baik (Kao, 1989).

Karakteristik kewiraswastawan yang dapat disarikan dari definisi-definisi di atas adalah : a) dorongan untuk menciptakan perbaikan kesejahteraan, b) jeli dalam melihat peluang ekonomis, c) kreatif dan terampil menciptakan nilai tambah pada komoditas barang atau jasa yang dijualnya, d) percaya diri dalam menetapkan resiko yang akan diambil, e) komitmen kerja yang kuat untuk mencapai tujuan, dan f) keterampilan hubungan interpersonal, terutama untuk mengkomunikasikan produk yang dimiliki dan meyakinkan *customers* bahwa produk tersebut layak dihargai.

Menurut Silvia Herawaty (1998), "pengertian kewirausahaan tidak lepas dari istilah kewiraswastawan. Istilah kewirausahaan sendiri merupakan pengembangan dari istilah kewiraswastawan. Perubahan istilah kewiraswastawan menjadi kewirausahaan lebih banyak didasarkan pada alasan bahasa secara maknawi, pengertian kewiraswastawan pada dasarnya tidak berbeda dengan kewirausahaan. Alih bahasa diduga khawatir karena penggunaan istilah kewiraswastawan dapat mempersempit makna yang sebenarnya, khususnya istilah swasta bila dikaitkan sebagai lawan arti dari kata pemerintah. Padahal secara maknawi, istilah kewiraswastawan juga mencakup sikap dan sifat yang harus dimiliki oleh pemerintah. Kekhawatiran ini beralasan karena tidak semua orang dalam masyarakat memahami pengertian maknawi kewiraswastawan". Menurut Bustanul Arifin (2001), wirausaha adalah "Seseorang yang mempunyai kemampuan kreatif, mampu menghasilkan ide-ide dan menerapkannya sehingga menjadi sesuatu yang bermanfaat

dan menguntungkan. Sedangkan kewirausahaan (*entrepreneurship*) merujuk kepada kepribadian tertentu, yaitu yang mulia, yang mampu berdiri di atas kemampuan sendiri, yang mampu mengambil keputusan untuk dirinya sendiri serta mampu menerapkan tujuan yang ingin dicapai atas pertimbangannya". "*Entrepreneur* adalah pengusaha yang memiliki keberanian untuk mengambil resiko dengan menciptakan produksi, termasuk modal, tenaga kerja dan bahan/input dari usaha bisnis mendapatkan profit/ laba". Menurut Bustanul Arifin Noer (2001), "ciri-ciri yang harus dimiliki seorang wirausaha yaitu: (1) bertanggung jawab, (2) memilih akibat yang moderat, (3) rasa percaya diri akan keberhasilan perorangan, (4) Keinginan untuk memperoleh umpan balik secara cepat, (5) Punya semangat tinggi, (6) berorientasi ke masa depan, (7) Mampu mengorganisasi, dan (8) Mendasarkan tindakan pada perolehan pendapatan".

3. Strategi Pemberdayaan Masyarakat.

Penerapan strategi pemberdayaan masyarakat berbasis masyarakat yang nampak lebih operasional dikemukakan oleh Aliyah Rasyid, dkk (2008) yang didasarkan dari hasil kegiatan penelitian pada masyarakat pedesaan di wilayah Gunungkidul, yang mengemukakan bahwa untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan model pendidikan kewirausahaan berbasis masyarakat pedesaan paling tidak ada lima strategi pemberdayaan yang perlu diterapkan, yaitu sebagai berikut:

a). Strategi pelatihan peserta kewirausahaan

Strategi pelatihan peserta kewirausahaan dimaksudkan sebagai suatu cara atau model untuk menyamakan persepsi peserta program dan membangun komitmen bersama dalam menemukan/mengembangkan berbagai alternative usaha produktif sesuai dengan potensi yang ada di desa mereka. Dalam kegiatan

ini peserta diharapkan dapat termotivasi untuk melakukan kegiatan usaha yang tumbuh dari dalam dirinya sendiri. Mereka dimotivasi agar bangkit dari ketidakmampuan dan kemiskinan menjadi manusia yang lebih berguna bagi keluarga dan masyarakatnya dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Untuk menambah pendapatan yang memadai tidak harus meninggalkan desa dan keluarga, tetapi bisa dilakukan di lingkungan desa dengan mencermati potensi yang ada. Peserta harus menyadari bahwa apabila tidak memiliki ketrampilan dan pendidikan yang memadai untuk berkompetisi di daerah perkotaan (urban) yang sarat dengan perjuangan keras maka akan lebih baik berjuang untuk mengembangkan kegiatan usaha produktif di desanya sesuai dengan latar belakang ketrampilan dan pendidikan yang dimilikinya (penduduk miskin di pedesaan). Strategi pelatihan sejenis ini akan efektif apabila, kegiatannya tidak terlalu formal, waktu kegiatan disesuaikan dengan waktu luang mereka, dan adanya tindak lanjut secara kongkrit setelah kegiatan pelatihan.

b). Strategi layanan prima bagi peserta pelatihan

Strategi layanan peserta pelatihan dibangun atas dasar kebutuhan peserta pelatihan atau sering disebut dengan layanan prima. Strategi ini dimaksudkan agar peserta memiliki keyakinan bahwa program yang ditawarkan adalah disesuaikan dengan kebutuhan para peserta dan mudah dilaksanakan jika pada suatu saat kegiatan tersebut akan berjalan berkelanjutan. Dalam strategi layanan prima ini yang dilakukan adalah dalam bentuk antara lain sebagai berikut: (1) kemudahan dalam berkomunikasi, (2) tanggap terhadap permasalahan dan kebutuhan dasar para peserta, (3) kemudahan dalam merealisasikan program yang

disepakati, dan (4) membantu dan memberikan dukungan atas upaya peserta dalam menindaklanjuti tujuan program.

c). Strategi pembentukan unit kegiatan KUP di pedesaan.

Kelompok usaha produktif (KUP) adalah merupakan suatu wadah kelembagaan organisasi peserta program yang dibentuk atas prakarsa bersama sebagai upaya untuk memudahkan dalam berkoordinasi dan menjalankan kegiatan usaha para anggotanya. Adanya KUP yang beranggotakan para peserta kader tersebut membuktikan adanya komitmen diantara peserta untuk menindaklanjuti kegiatan usaha produktif yang sudah dibangunnya. Nama KUP di masing-masing desa diserahkan sepenuhnya kepada peserta yang didukung oleh aparat pemerintah desa yang ditunjuk. Implikasi dari pembentukan KUP tersebut agar dapat berjalan efektif, antara lain adalah: (1) diperlukan insentif bantuan permodalan usaha KUP, (2) diperlukan pembentukan pengurus KUP, dan (3) diperlukan pertemuan secara rutin termasuk merumuskan program bersama. Jika KUP yang didirikan di masing-masing desa tersebut menunjukkan keberhasilannya diharapkan dapat membangkitkan motivasi anggota warga lainnya terutama remaja putus sekolah dan pengangguran ikut berperanserta atau berpartisipasi membangun kegiatan usaha produktif secara mandiri baik melalui KUP yang sudah ada maupun membentuk KUP-KUP baru. Pada gilirannya akan berdampak pada penurunan jumlah angka pengangguran dan kemiskinan di pedesaan.

d). Strategi pembinaan berkelanjutan bagi peserta kader.

Salah satu strategi yang dilakukan adalah dengan cara pembinaan berkelanjutan. Pembinaan berkelanjutan dimaksudkan agar kegiatan usaha produktif yang sudah dirintis mereka dapat berjalan dengan baik dan apabila menghadapi permasalahan segera dapat diatasi bersama. Pembinaan berkelanjutan ini dapat dilakukan oleh pihak tim penggerak maupun oleh pembina aparatur desa. Apabila peserta program sudah dianggap memiliki kemampuan secara mandiri, maka pihak tim penggerak dari luar secara berangsur dapat melepaskannya, dan diharapkan pihak pembina aparatur desa melanjutkan pembinaannya. Untuk pembinaan berkelanjutan tersebut juga diharapkan adanya partisipasi pemerintah daerah kabupaten atau pihak instansi terkait lainnya terutama yang berkaitan dengan bidang pembinaan usaha kecil dan pengembangan ekonomi kerakyatan.

e). Strategi bantuan peralatan dan permodalan untuk kegiatan usaha.

Strategi pemberian bantuan peralatan dan permodalan usaha dimaksudkan agar peserta program dapat secara langsung menindaklanjuti kegiatan pemberdayaan dalam bentuk program aksi kegiatan usaha produktif. Model bentuk bantuan peralatan dan permodalan ini disamping akan membantu para peserta untuk mengembangkan usaha produktif sesuai minatnya, juga memberikan semangat bagi peserta bahwa kegiatan tersebut memberikan dampak terhadap pemecahan masalah yang sedang dihadapi mereka dalam bentuk alternatif kekuatan usaha produktif sesuai kebutuhannya. Strategi tersebut nampaknya cocok diterapkan bagi masyarakat pedesaan saat ini, karena umumnya mereka cenderung memiliki pola pikir bahwa setiap bentuk kegiatan yang dilakukan di pedesaan tanpa adanya dukungan peralatan dan atau modal usaha akan sulit dapat

direalisasikan secara memadai, termasuk dalam mendukung program pengembangan usaha produktif rumah tangga.

Dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya penerapan strategi pemberdayaan masyarakat akan berjalan efektif apabila disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan potensi yang ada di lingkungan masyarakat setempat. Intervensi yang dilakukan oleh pihak luar semata-mata hanyalah diperuntukan untuk membantu atau memfasilitasi masyarakat setempat untuk menemukan permasalahan pokok yang menyebabkan ketidakberdayaan dan kemiskinan mereka dan membangun motivasi untuk dapat bangkit membangun kehidupan yang lebih layak yang bersumber dari dirinya sendiri serta potensi yang dimiliki, sehingga etos kerja yang sudah dimiliki semakin ditingkatkan dan dimilikinya jiwa kewirausahaan yang tangguh untuk dapat meningkatkan tambahan penghasilan yang bersumber dari potensi yang ada di lingkungan setempat.

4. Hasil Penelitian Relevan.

Sujiono (2004) dengan judul "Pengaruh Tingkat Inflasi terhadap Tingkat Pengangguran Di Indonesia Tahun 1985-2002" dengan variabel Y (tingkat pengangguran tahun t di Indonesia), X_t (tingkat inflasi tahun t di Indonesia), X_{t-1} (tingkat inflasi tahun $t-1$ di Indonesia), X_{t-2} (tingkat inflasi tahun $t-2$ di Indonesia), Y_{t-1} (tingkat pengangguran tahun $t-1$ di Indonesia), Y_{t-2} (tingkat pengangguran tahun $t-2$ di Indonesia), hasilnya mengenai teori kurva Phillips yang mengatakan bahwa pengaruh tingkat inflasi terhadap tingkat pengangguran bersifat negatif. Berdasarkan data yang diperoleh dan hasil estimasinya menyatakan bahwa selama tahun 1985-2002 di Indonesia tidak terbukti. Kemudian tingkat pengangguran tahun

t-1 berpengaruh positif terhadap tingkat pengangguran tahun t di Indonesia dengan koefisien sebesar 0,799, yang artinya jika tingkat inflasi tahun t naik 1%, maka tingkat pengangguran tahun t naik sebesar 0,799%. Untuk nilai konstanta dari hasil estimasi tingkat pengangguran di Indonesia bertanda positif sebesar 1,192 yang menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di Indonesia selama tahun 1985-2002 sebesar 1,192% tanpa adanya pengaruh dari variabel tingkat inflasi tahun t, tingkat inflasi t-1, tingkat inflasi t-2, tingkat pengangguran t-1 dan tingkat pengangguran t-2 hasil nilai R^2 Adjusted yang diteliti Sujiono adalah 0,439, yang berarti sebesar 43,9% variasi perubahan tingkat pengangguran tahun t di Indonesia dapat dijelaskan oleh setiap variasi perubahan tingkat pengangguran pada tahun t-1 dalam penelitian yang dilakukan oleh Sujiono (2004) hanya mengetahui Pengaruh Tingkat Inflasi terhadap Tingkat Pengangguran Di Indonesia Tahun belum menemukan cara bagaimana mengatasi pengangguran. Penelitian yang dilakukan oleh Kusmiyati (2008) "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengangguran terbuka di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1986-2005 juga belum mengatasi secara nyata untuk mengurangi angka pengangguran karena hanya mencari faktor-faktor penyebab pengangguran terbuka.

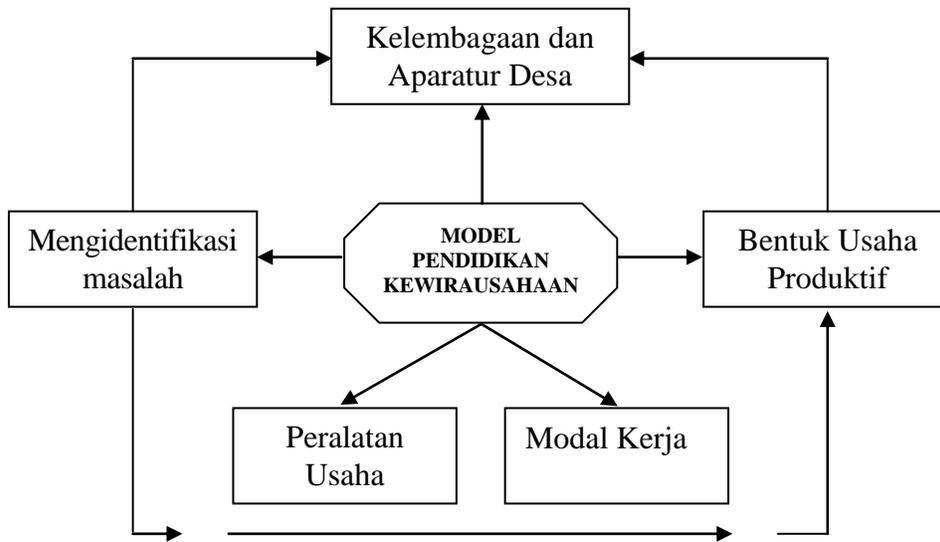
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mubyarto di 5 kabupaten/kota di propinsi DIY mulai September 2002- - Januari 2003, yang disampaikan pada acara Seminar: Aplikasi Manual Tentang Penanggulangan Kemiskinan Bersasaran (*A Manual for Evaluating Targeted Alleviation Programmes*) di Jakarta pada tanggal 6 Maret 2006, mengungkapkan bahwa dana hibah program IDT di Karangawen Gunungkidul telah meningkatkan pendapatan penduduk miskin sebesar 97% selama 8 tahun (1994-2002).

Meskipun dana IDT diberikan sebagai hibah pemerintah pusat kepada 123.000 pokmas di seluruh Indonesia, tetapi di Karangawen dijadikan model simpan-pinjam yang kini telah berkembang 126%. Lebih lanjut menyebutkan bahwa hal tersebut menunjukkan sebagai bukti dimana rakyat/penduduk miskin tidak pernah memperlakukan dana IDT sebagai program belas kasihan (*charity*) tetapi benar-benar sebagai dana program pemberdayaan ekonomi rakyat yang mampu mengembangkan masyarakat desa yang mandiri dan percaya diri. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mubyarto tentang program penanggulangan kemiskinan tersebut, meskipun telah mampu mengungkapkan tentang jumlah peningkatan pendapatan sebesar 97% selama 8 tahun dengan model simpan-pinjam dalam pemanfaatan dana IDT, namun secara operasional juga belum dapat membuktikan yang menggambarkan tentang seberapa besar jumlah penduduk miskin yang dapat dientaskan selama kurun waktu 8 tahun tersebut.

Oleh karena itu berdasarkan uraian diatas dan penelitian yang dilakukan oleh Sujiono (2004) dan Kusmiyati (2008) keduanya belum menemukan cara bagaimana mengatasi pengangguran setidaknya menekan angka pengangguran sehingga dapat menekan kemiskinan maka peneliti ingin melakukan suatu cara untuk mengatsi pengangguran dan menekan angka kemiskinan dengan model pengembangan pelatihan/pendidikan kewirausahaan bagi pengangguran perkotaan di Kota Yogyakarta sebagai upaya pengentasan kemiskinan.

5. Kerangka Pikir.

Gambar siklus pemecahan masalah tersebut dapat dilihat dalam sajian dalam bentuk kerangka berpikir sebagai berikut ini:



Gambar: 1. : Siklus Pemecahan Masalah dalam Model Pengembangan Pelatihan/Pendidikan Kewirausahaan

Bagan diatas ini adalah kerangka berfikir yang dikembangkan dalam penelitian ini yaitu apabila pelaksanaan pendidikan kewirausahaan bagi penduduk miskin di perkotaan didasarkan atas kebutuhan peserta program yang didukung oleh aparatur pemerintah desa setempat dan bantuan peralatan serta permodalan memadai akan mampu untuk mengembangkan kegiatan usaha produktif, sehingga akan membawa dampak pada aktifitas kerja penduduk yang mampu meberikan tambahan pendapatan dan dalam jangka panjang juga berdampak pada penurunan jumlah penduduk miskin terutama bagi mereka yang bertempat tinggal di lingkungan pemukiman penduduk asli perkotaan.

C. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian pengembangan suatu model strateg pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan kewirausahaan. Menurut Borg and Gall (1989:782), yang dimaksud dengan model penelitian dan pengembangan adalah “a

process used develop and validate educational product". Dalam *'research based development'*, yang muncul adalah suatu model atau strategi dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Selain untuk mengembangkan dan memvalidasi hasil-hasil pendidikan, *Research and Development* juga bertujuan untuk menemukan pengetahuan-pengetahuan baru melalui *'basic research'*, atau untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan khusus tentang masalah-masalah yang bersifat praktis melalui *'applied research'*, yang digunakan untuk meningkatkan praktik-praktik pendidikan. Dalam penelitian ini *Research and Development* dimanfaatkan untuk menghasilkan model pengembangan pelatihan/pendidikan kewirausahaan bagi pengangguran perkotaan di Kota Yogyakarta sebagai upaya pengentasan kemiskinan.

Kegiatan mengembangkan, memvalidasi hasil-hasil dan meningkatkan. kegiatan pengembangan pelatihan dimaksudkan sebagai upaya pemberdayaan untuk menemukan pengembangan bentuk pendidikan kewirausahaan baru yang dapat dijadikan sebagai sumber usaha baru bagi pengangguran perkotaan di Kota Yogyakarta. Penerapan *Research and Development* dalam penelitian ini bertujuan selain untuk memberikan perubahan, juga untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi pemerintah Daerah Kota Yogyakarta (DIY) khususnya Pemerintah di Kota Yogyakarta tentang pengangguran diperkotaan dan kemiskinan, terutama bagi penduduk asli miskin yang bertempat tinggal di lingkungan permukiman penduduk asli Kota Yogyakarta.

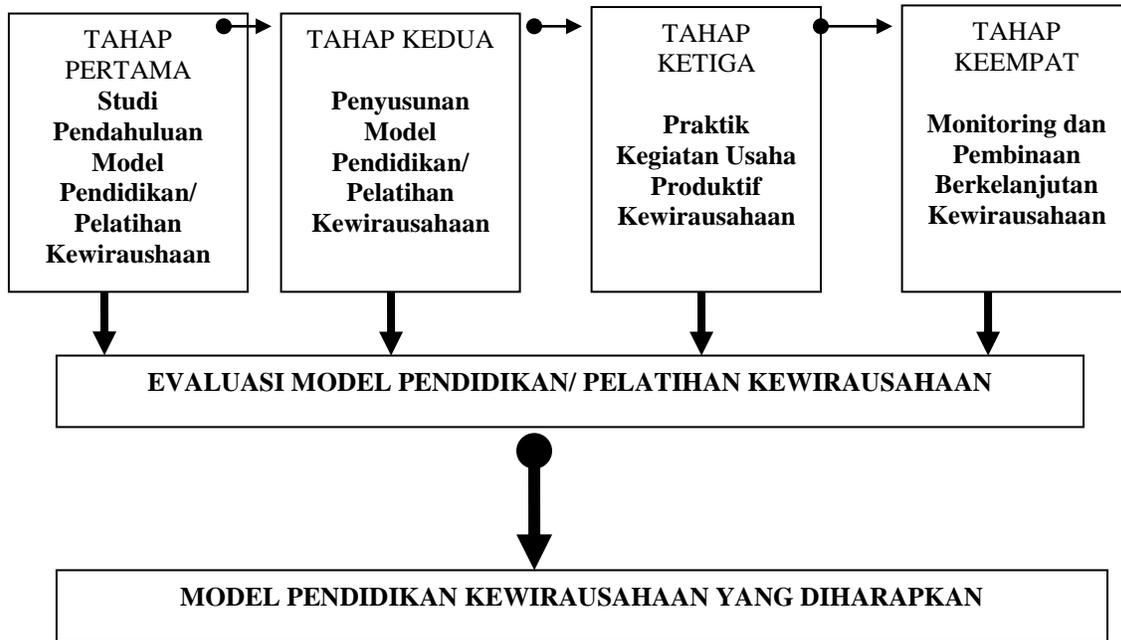
Metode yang tepat digunakan dalam kaitan dengan masalah penelitian ini adalah *research and developmet*. Produk yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah pengembangan model pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan kewirausahaan,

bahan ajar, dan modul pelatihan kewirausahaan untuk kelompok pengangguran perkotaan di Kota Yogyakarta, serta efektifitas bentuk dan materi pelatihan kewirausahaan.

Konsep penelitian dan pengembangan dari Borg and Gall (Sukmadinata, 2006: 169) ada 10 tahap dengan tidak mengurangi validitas proses dan temuan dalam penelitian ini *Research and Development* yang dikembangkan Borg dan Gall (1989:784), diadaptasi dan diadakan sedikit modifikasi dalam tahapannya menjadi seperti berikut: 1) meneliti dan mengumpulkan informasi tentang kebutuhan pengembangan pelatihan, 2) merencanakan prototipe komponen yang akan dikembangkan termasuk mendefinisikan jenis pengembangan pelatihan usaha yang akan dikembangkan, merumuskan tujuan, menentukan urutan kegiatan dan membuat skala pengukuran (instrumen penelitian), 3) mengembangkan prototipe awal untuk dijadikan model, 4) melakukan validasi model konseptual kepada para ahli atau praktisi. 5) melakukan ujicoba terbatas (tahap I) terhadap model awal, 6) merevisi model awal, berdasarkan hasil ujicoba dan analisis data, 7) melakukan ujicoba secara luas (tahap II), 8) melakukan revisi akhir atau penghalusan model, apabila peneliti dan pihak terkait menilai proses dan produk yang dihasilkan model belum memuaskan, dan 9) membuat laporan penelitian dan melakukan diseminasi kepada berbagai pihak.

Dari sembilan langkah tersebut, agar proses pengembangan pelatihan menjadi lebih efektif dan efisien sesuai, maka pelaksanaannya dibagi dalam empat siklus : studi pendahuluan pengembangan pelatihan kewirausahaan, penyusunan desain model pengembangan pelatihan kewirausahaan, Implementasi model pengembangan pelatihan kewirausahaan uji coba model pengembangan pelatihan, evaluasi hasil pengembangan pelatihan kewirausahaan dan menemukan model yang diharapkan untuk pelatihan

pengembangan kewirausahaan . Untuk lebih jelas dapat dilihat bagan siklus penelitian dan pengembangan pelatihan kewirausahaan kelompok pengangguran perkotaan di Kota Yogyakarta sebagai upaya pengentasan kemiskinan. Gambar atau tahapan pemecahan masalah tersebut dapat dilihat dalam sajian berikut ini :



TAHAP PERTAMA:

Pada tahap pertama, dititik beratkan pada penilaian kebutuhan peserta program yang dapat direkrut dari penduduk pengangguran miskin. Dalam penilaian atau analisis kebutuhan ini pada hakekatnya adalah untuk menemukan kebutuhan pengembangan pelatihan kewirausahaan bagi pengangguran perkotaan di kota yogyakarta yang sesuai bagi pengangguran yang bersifat praktis dan aplikatif. Kegiatan analisis kebutuhan dilakukan sebelum menentukan jenis pengembangan pelatihan, yaitu dengan membahas hasil kegiatan wawancara dengan calon peserta pelatihan, dan diperkuat dari masukan hasil wawancara dengan Bapak Camat, Bapak Lurah, tokoh masyarakat setempat, dan pihak Pemeritah Kota Yogyakarta. Pada tahap analisis kebutuhan yang diteliti meliputi;

(a) analisis kemampuan yang telah dimiliki pengangguran saat ini, (b) analisis masalah dan kebutuhan yang diharapkan dalam pengembangan pelatihan kewirausahaan, dan (c) analisis potensi sumberdaya yang dapat dikembangkan. Dari hasil analisis atau pengkajian tersebut peneliti akan dapat menentukan jenis pengembangan pelatihan yang dibutuhkan dalam mengembangkan kemampuan berwirausaha.

TAHAP KEDUA

Pada tahap kedua ini dititik beratkan untuk menyusun desain model konseptual pengembangan pelatihan kewirausahaan bagi pengangguran perkotaan di Kota Yogyakarta dilakukan berdasarkan hasil analisis kebutuhan. Desain model yang disusun dalam penelitian ini menerapkan pendekatan sistem pembelajaran dengan memperhatikan delapan komponen. Secara garis besar kedelapan komponen tersebut tercakup dalam tiga tahap yaitu: tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Pada tahap perencanaan terdiri dari: (1)menentukan tujuan pengembangan pelatihan kewirausahaan bagi pengangguran di perkotaan di Kota Yogyakarta, (2) menentukan mata pelajaran dan analisis tujuan pengembangan pelatihan kewirausahaan bagi pengangguran di perkotaan di Kota Yogyakarta,, (3) menentukan kelompok calon peserta dengan mengidentifikasi kemampuan awal calon peserta pelatihan yang akan menerima pelajaran, dan (4) merumuskan tujuan atau tingkat hasil belajar yang ingin dicapai dengan menentukan kawasan belajar tertentu dari setiap mata pelajaran. Tahap pelaksanaan, terdiri dari; (1) menentukan tes awal (*pre-test*) dari setiap mata pelajaran dengan mendasarkan pada tingkat hasil belajar yang telah ditentukan, (2) pengembangan materi pelajaran untuk setiap mata pelajaran, dan (3) pengembangan strategi pembelajaran. Sedang pada tahap

evaluasi menentukan 1 komponen, yaitu tes akhir (*post-test*). Tes ini bertujuan tujuan untuk mengetahui manfaat dari pelatihan yang telah diikuti peserta.

TAHAP KETIGA

Pada tahap ketiga sudah difokuskan kepada pelaksanaan praktik kegiatan usaha produktif bagi peserta program. Oleh karena itu pada tahap ini mereka yang akan merealisasikan kegiatan usaha produktif diberikan dukungan berupa peralatan usaha dan bantuan permodalan yang memadai, sehingga mereka mampu memulai kegiatan usaha dengan baik. Dalam kegiatan praktik usaha ini fasilitator berkolaborasi dengan peserta program untuk mengevaluasi bersama serta memonitoring tentang kegiatan perkembangan usaha produktif, dengan maksud jika menghadapi permasalahan dapat dipecahkan secara dini.

TAHAP KEEMPAT

Dalam tahap ke-empat ini, peneliti melakukan monitoring dan pembinaan berkelanjutan agar peserta program mampu menjalankan kegiatan usaha produktif, termasuk menghitung jumlah penambahan pendapatan yang diperoleh. Dalam pembinaan berkelanjutan ini diharapkan agar peserta program memiliki motivasi yang kuat untuk maju dan mandiri bersama dengan peserta program lainnya, dan bila perlu membentuk Kelompok Usaha Produktif sebagai wadah organisasi bersama serta memecahkan persolan yang dihadapi dalam rangka memajukan usaha.

Implementasi model pengembangan pelatihan kewirausahaan bagi pengangguran perkotaan di Kota Yogyakarta dilakukan dengan menggunakan desain

ekperimental semu atau *Pre-Experimental Design* satu kelompok dengan pre-test dan post-test. (Borg & Gall, 1989:536, dan Fraenkel & Wallen, 1993:128) Tujuan penggunaan desain ini untuk menguji keefektifan model dan validasi model konseptual yang telah dihasilkan secara empirik. Pengujian keefektifan model dilakukan terhadap model konseptual yang dikembangkan sehingga dapat menjadi model empirik atau layak terap. Rumusan disain yang digunakan untuk menguji keefektifan model adalah dengan menggunakan disain penelitian. “*One-Group Pretest-Posttest Design*”.

Selanjutnya pengembangan pelatihan kewirausahaan bagi pengangguran di Kota Yogyakarta dilaksanakan terhadap kelompok belajar dan implementasi pengembangan pelatihannya dilakukan selama proses penelitian berjalan. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman terhadap peserta pelatihan dalam pengimplementasian prinsip-prinsip pelatihan, strategi pendekatan, langkah-langkah, dan pemberdayaan peserta baik selama dan setelah eksperimen dilakukan. Dalam fase ini peneliti berperan; (a) mengkomunikasikan, mendiskusikan dan menegosiasikan dengan praktisi (peserta pelatihan dan nara sumber) yang bertujuan untuk memperoleh kesepakatan dan pengertian tentang eksperimen yang akan dilakukan, (b) peneliti melakukan motivasi kepada semua komponen yang terkait dengan pelaksanaan pelatihan. Pada akhir eksperimen dilakukan post-test melalui kuesioner yang sama untuk mengetahui seberapa jauh keefektifan model yang dikembangkan. Data post-test dibandingkan dengan data pre-test, kemudian dianalisis untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya terjadi dari pelatihan. Pemberian pre-test dan post-test juga bertujuan untuk melihat perbedaan kemampuan individu dalam kelompok antara sebelum dan sesudah

diberikan pelatihan. Hasil eksperimen ini selanjutnya dilakukan revisi untuk menghasilkan model yang teruji.

Observasi atau pemantauan dilakukan selama kegiatan uji coba atau eksperimen berjalan. Kegiatan pemantauan dilakukan secara langsung dengan menggunakan bantuan lembar observasi, baik dalam bentuk terstruktur maupun yang bersifat terbuka terhadap fenomena yang bersifat menghambat keefektifan eksperimen. Kegiatan observasi dilakukan pada kelompok tunggal dari mulai sebelum diberi pelatihan sampai sesudah diberi pelatihan. Observasi bertujuan untuk melihat segala aktifitas dan akibat atau perubahan yang dialami pengangguran setelah diberikan perlakuan pelatihan.³⁾ Evaluasi; hasil yang diperoleh dari hasil observasi dan monitoring merupakan bahan dasar yang digunakan untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan eksperimen.

Kegiatan evaluasi terdiri dari kegiatan analisis, interpretasi, dan kejelasan (*explanation*) dari semua informasi yang diperoleh dari pengamatan. Setiap informasi yang diperoleh dikaji bersama praktisi atau ahli (termasuk lewat tulisan yang dipublikasikan). Informasi yang diperoleh diurai, dicari kaitan satu dengan lainnya, dikaitkan dengan teori tertentu atau temuan dari penelitian lain. Kegiatan evaluasi tidak cukup hanya membandingkan hasil pre-test dan post-test saja, akan tetapi juga semua aktifitas selama kegiatan pelatihan berlangsung. Diantaranya seperti: kinerja dan kemampuan fasilitator dalam melaksanakan pelatihan, keaktifan peserta selama mengikuti pelatihan, serta partisipasi dari tokoh masyarakat setempat dan instansi terkait dalam dan selama pelatihan.

2. Tehnik dan Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: (1) pengamatan partisipasi/observasi (2) studi dokumentasi; dan (3) wawancara; (4) Angket. Penilaian dilakukan dengan memberikan penilaian awal sebelum pelatihan dan sesudah kegiatan pelatihan keterampilan secara keseluruhan, serta membandingkan dengan prestasi kerja dilapangan. Kegiatan pengumpulan data dengan menggunakan teknik-teknik sesuai jenis instrumen yang digunakan sebagai berikut : *Observasi partisipatif*, dilakukan peneliti sebagai pengamat dengan melibatkan diri dalam kegiatan pengembangan pelatihan yang sedang dilakukan atau sedang dialami sedang peserta pengembangan pelatihan tersebut tidak mengetahui kalau mereka sedang di observasi. Observasi, digunakan selama penelitian berlangsung untuk mencermati beragam fenomena sejak tahap studi orientasi suasana lingkungan penelitian, implementasi, sampai evaluasi hasil. Observasi partisipan juga dilakukan terutama pada saat studi pendahuluan (*eksplorasi*) dan selama proses uji coba pelatihan berlangsung, dan yang diobservasi adalah mekanisme kerja yang telah ditetapkan dalam prosedur sistem implementasi. *Studi dokumentasi*, digunakan untuk menjaring data di dalam dokumendokumen tertulis yang menunjukkan adanya hubungan dengan masalah pemberdayaan masyarakat dalam sebuah pengembangan pelatihan kewirausahaan, sebagai upaya pengembangan kemampuan dalam beralih kewirausahaan. Jenis informasi yang ditelusuri dengan cara ini adalah berkaitan dengan kebijakan pemerintah struktur masyarakat Kota Yogyakarta, penyelenggaraan pengembangan pelatihan yang terpilih, dan upaya-upaya dalam pengembangan kemampuan bagi pengangguran di Kota Yogyakarta. Studi dokumentasi juga digunakan untuk membantu melengkapi data yang

benar. *Wawancara*, digunakan untuk mewawancarai sejumlah *key informant* yang dianggap sebagai tokoh kunci dalam penelitian, yaitu disamping pejabat pemerintah Pemerintah Kota Yogyakarta, Badan Pusat Statistik Balai Latihan Kerja dan Dinas Ketenagakerjaan dan kepada sumber belajar berkisar tentang pengalaman, cara mengimplementasikan dan metode yang digunakan dalam pengembangan pelatihan kewirausahaan.

3. Lokasi dan Subjek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di 2 Kecamatan di Kota Yogyakarta, yaitu kecamatan Tegalarjo dan kecamatan Umbulharjo. Masing-masing kecamatan diambil 1 desa sampel yang merupakan lingkungan pemukiman penduduk asli kota Yogyakarta. Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat di Kota Yogyakarta yang belum mempunyai pekerjaan atau pengangguran. Penetapan peserta pelatihan dilakukan secara purposive dan dengan cara menanyakan langsung kepada calon peserta atau secara sosiogram. Keberadaan masyarakat sebagai peserta pelatihan bukan mewakili jumlah penduduk Kota Yogyakarta secara keseluruhan, melainkan merupakan bagian dari sekelompok masyarakat yang terpilih sesuai persyaratan yang telah ditentukan.

Subjek peserta program yang digunakan dalam penelitian ini, dipilih yang memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut, yaitu (1) peserta pelatihan yang terdiri dari kelompok pengangguran perkotaan Yogyakarta, (2) peserta program merupakan penduduk asli kota Yogyakarta, (3) mereka tergolong katagori penduduk miskin, (4) kesedian untuk mengikuti secara penuh dan sungguh-sungguh sebagai peserta program, (5) berpendidikan rendah atau SD-SLTA, dan (6) memiliki tempat tinggal menetap.

4. Populasi dan Sampel Penelitian

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah penduduk pengangguran miskin yang bertempat tinggal di lingkungan penduduk asli kota Yogyakarta yang terdapat dua pemukiman sample di kecamatan Tegalrejo dan kecamatan Umbulharjo. Sedangkan jumlah sampelnya dipilih secara purposive sebanyak 30 orang peserta program, dengan mempertimbangkan karakteristik peserta sebagai berikut, yaitu: 1) peserta pelatihan yang terdiri dari kelompok pengangguran perkotaan Yogyakarta, (2) peserta program merupakan penduduk asli kota Yogyakarta, (3) mereka tergolong katagori penduduk miskin, (4) kesedian untuk mengikuti secara penuh dan sungguh-sungguh sebagai peserta program, (5) berpendidikan rendah atau SD-SLTA, dan (6) memiliki tempat tinggal menetap.

Penetapan subjek penelitian dilakukan dengan menganalisis tingkat ekonomi dan pendidikan. Setelah dilakukan analisis tingkat ekonomi kemudian dilakukan identifikasi terhadap subjek penelitian yang akan diujicoba seperti: (1) menetapkan model pengembangan pelatihan kewirausahaan, (2) jenis usaha memiliki keunggulan dan mudah dipraktekan, dipasarkan, (3) memilih dan menentukan calon peserta untuk dilatih, (4) calon peserta adalah masyarakat yang belum mendapat pekerjaan atau pengangguran, dan (5) memiliki minat serta bersedia menularkan keterampilan yang diterimanya kepada orang lain. Jumlah peserta yang terpilih untuk mengikuti pelatihan dan sesuai persyaratan sebanyak 30 orang, yang terbagi kedalam 2 kelompok yang masing-masing kelompok beranggotakan 15 orang.

5. Analisis dan Penafsiran Data

Sesuai model analisis data kualitatif, langkah-langkah analisis data yang dilakukan adalah : (1) setelah data terkumpul, penulis mengadakan reduksi data dengan jalan merangkum laporan lapangan, mencatat hal-hal pokok yang relevan dengan fokus penelitian; (2) menyusun secara sistematis berdasarkan kategori dan klasifikasi tertentu; (3) membuat display data dalam bentuk tabel ataupun gambar sehingga hubungan antara data yang satu dengan lainnya menjadi jelas dan utuh (tidak terlepas-lepas); (4) mengadakan *cross site analysis* dengan cara membandingkan dan menganalisis data secara mendalam; dan (5) menyajikan temuan, menarik kesimpulan dalam bentuk kecenderungan umum dan implikasi penerapannya, dan rekomendasi bagi pembuatan kebijakan strategi nasional tentang model pemberdayaan masyarakat untuk pengentasan kemiskinan dan mengurangi pengangguran di perkotaan.

D. Tim Peneliti

Jumlah tim peneliti terdiri dari 3 orang, dengan susunan personalia dan pembagian tugas pekerjaan sebagai berikut:

E. Jadwal Penelitian.

Penelitian ini direncanakan akan berjalan selama 10 bulan efektif yang dimulai pada 20 Februari s/d 20 Desember 2009.

No.	Kegiatan	Bulan									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Persiapan	X									
2.	Operasional Lapangan		XX	X						X	
3.	Seminar		XX	=	=	=	=	=	=	X	
4.	Analisa data										
5.	Penyusunan laporan hasil penelitian										

F. Anggaran Biaya.

Jumlah total anggaran biaya penelitian yang diperlukan sebanyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). Perhitungan secara terperinci untuk masing-masing komponen anggaran terlampir.

Secara garis besar rekapitulasi anggaran penelitian berdasar kelompok komponen anggaran adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp.)	PROSENTASE %
1	Gaji dan Upah	28.876.000	28,88
2	Peralatan, permodalan, dan modul	21.000.000	21,00
3	Bahan Habis Pakai dan ATK	14.424.000	14,20
4	Seminar dan Perjalanan	17.050.000	17,05
5	Pembuatan Laporan Hasil dan Copy	8.650.000	8,65
6	Manajemen fee dan lain-lain	10.000.000	10,00
	JUMLAH	100.000.000	100

DAFTAR PUSTAKA

Aliyah Rsyid, dkk. (2008)., *Model Pendidikan Kewirausahaan Berbasis Masyarakat Pedesaan Sebagai Usaha Pengentasan Kemiskinan di Wilayah Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta*, Penelitian Hibah Bersaing Tahun II DP2M-DIKTI, Lembaga Penelitian UNY.

Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta Tahun 2007

Borg and Gall. 1979. *Educational Research: An Introduction*. New York: Allyn and Bacon Inc.

Bustanul Arifin. 2000. *Membangun Spirit Enterprenuer Muda Indonesia*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Darwin, Muhajir M., (2005). *Memanusiakan Rakyat penanggulangan Kemiskinan sebagai Arus Utama Pembangunan*, Benang Merah, Yogyakarta.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2000. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Dessy Anwar. 2001. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Rosda Karya

Endang Saefudin Anshari. 1987. *Ilmu Filasafat dan Wirausaha*. Surabaya: Bina Ilmu

Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI, (2008). *Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri*.

Mubyarto (2003). Aplikasi manual tentang penanggulangan kemiskinan bersasaran: “*Manual for Evaluating Targeted Alleviation Programmes*”, makalah disampaikan pada acara Lokakarya di Jakarta tanggal 6 Maret 2003.

Silvia Herawati. 1998. *Kewirausahaan*. Jakarta: IPWI

Simanjuntak. 1998. *Pengalaman Teori di Bidang Sumber Daya Manusia Kesempatan Kerja dan Pengembangan Ekonomi*. Jakarta: Lembaga Penerbit.

Sudjana , S. H.D. 2007. *Sistem dan Manajemen Pelatihan, Teori dan Aplikasi*, Falah Production, Bandung.

Suwarjono. 1997. *Ilmu kewirausahaan*. Bandung: Gerhana

Umi Sukanti Nirbito. 2000. *Manajemen Usaha Kecil dan Kewirausahaan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.

